

## Studi kasus penyelesaian tindak pidana dihadapan aparat desa dikelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende: perspektif hukum Islam dan KUHP

Oleh  
Moh. Rustam  
O19100149

Pembimbing  
M. Hasyim Manan

### Abstrak

Tindak pidana yang sering terjadi di Kelurahan Kotaratu adalah tindak pidana pencurian, perzinaan, meskipun terdapat juga tindak pidana lainnya yang terjadi dalam frekuensi minimum. Masyarakat Kelurahan Kotaratu adalah masyarakat yang berpenduduk mayoritas beragama Islam maka mereka sangat menjunjung tinggi dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan. Oleh karena itu, mereka tidak mengharapkan munculnya akibat yang merusak ketertiban masyarakat dan merusak aqidah warga setempat. Mengatasi kejadian itu maka pimpinan masyarakat setempat membuat suatu aturan yang langsung diputuskan berdasar otoritas Kepala Kelurahan Kotaratu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa di Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende ditinjau menurut Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana oleh aparat desa di Kelurahan Kotaratu ditinjau dari hukum pidana Islam dan kitab Undang-Undang hukum pidana. Metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif, sedangkan metode pembahasannya menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pihak aparat Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende merupakan tindakan awal sebagai peringatan dan pembinaan terhadap warga masyarakatnya agar tidak mengulangi tindakan semacam itu lagi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif, 2. Oleh karena sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diterapkan oleh aparat Kelurahan Kotaratu Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende itu bertujuan sebagai langkah pembinaan terhadap warga masyarakatnya, maka penerapan tersebut diperbolehkan menurut hukum pidana Islam dan KUHP

Kata Kunci : Tindak pidana, Aparat Desa, Hukum Islam